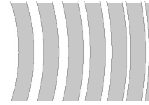


gedung Arva Lt.3 Jl. RP. Soeroso No. 40 BC Gondangdia Menteng Jakarta Pusat 10350
: (+62-21) 391 7814 F: (+62-21) 314 3867 www.lsi.or.id



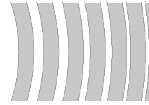
SURVEI NASIONAL ISU TERKAIT REVISI KUHAP

Waktu survei:
22 – 26 Maret 2025



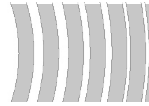
PENGANTAR

- Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
- Revisi KUHAP mendesak untuk segera dibahas mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbit melalui UU No. 1 tahun 2023.
- Ada berbagai perdebatan mengenai RUU KUHAP yang sedang dibahas, antara lain terkait keadilan restoratif (*restorative justice*), kewenangan melakukan penyidikan, perlindungan HAM bagi warga negara yang terlibat kasus pidana, dll.
- Prinsip dan tata cara yang demokratis sangat diperlukan guna menghasilkan revisi KUHAP yang dapat memenuhi rasa keadilan, menghormati dan melindungi HAM, dan dapat diterapkan dalam kerangka negara demokrasi.
- Oleh karena itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei telepon nasional untuk menangkap aspirasi dan pandangan masyarakat mengenai beberapa aspek penting dalam diskusi revisi KUHAP.
- Penting untuk menjadi catatan bahwa substansi dan perdebatan mengenai revisi KUHAP bersifat sangat teknis sehingga diperlukan penyederhanaan formulasi pertanyaan survei guna memudahkan responden mencerna pertanyaan survei dan mendapatkan pandangan/persepsi/pendapat responden yang akurat.

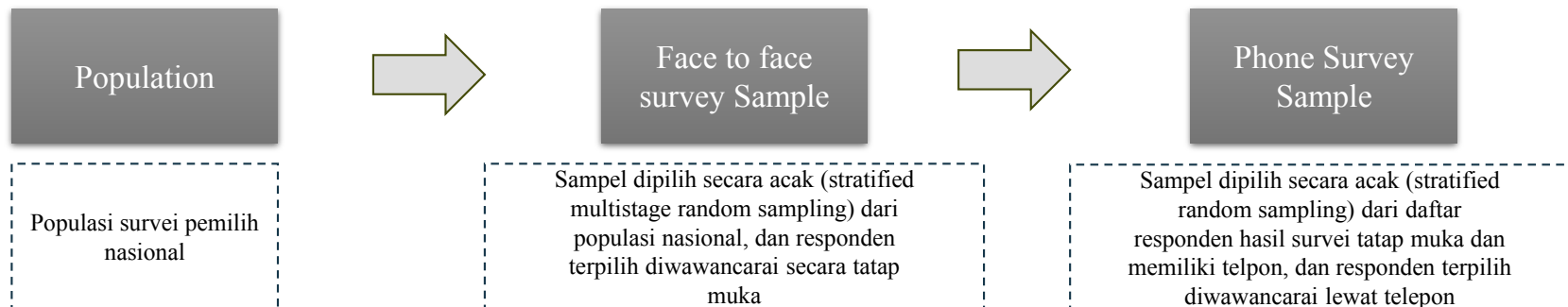


METODOLOGI

- Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/telepon selular.
- Sampel sebanyak 1,214 responden dipilih melalui metode Double Sampling. DS adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka LSI yang dilakukan sebelumnya.
- Margin of error survei diperkirakan $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
- Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.



FLOWCHART DOUBLE SAMPLING





RESPONSE RATE

DS	
Total Nomor telepon yang dikontak secara acak (dialed) [X]	Jumlah responden yang berhasil diwawancarai [Z]
16428	1214



VALIDASI: SAMPEL VS POPULASI (%)

KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
GENDER			
Laki-laki	50.3	49.9	50.0
Perempuan	49.7	50.1	50.0
DESA-KOTA			
Pedesaan	51.5	50.4	50.2
Perkotaan	48.5	49.6	49.8
USIA			
<= 20 tahun	1.2	9.1	9.2
21-25 tahun	4.6	10.8	10.9
26-30 tahun	7.6	10.8	10.8
31-35 tahun	11.5	10.7	10.7
36-40 tahun	13.0	10.8	10.8
41-45 tahun	17.3	10.0	10.0
46-50 tahun	11.9	9.3	9.3
51-55 tahun	12.4	8.2	8.2
56-60 tahun	7.7	6.7	6.7
> 60 tahun	12.8	13.6	13.5

KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
AGAMA			
Islam	88.5	86.9	87.2
Lainnya	11.5	13.1	12.8
ETNIS			
Jawa	43.1	40.3	40.2
Sunda	16.4	15.9	15.5
Batak	2.2	3.6	3.6
Madura	3.2	3.0	3.0
Betawi	2.6	2.9	2.9
Minang	2.8	2.6	2.7
Bugis	3.5	2.6	2.7
Melayu	2.6	2.3	2.3
Lainnya	23.6	26.8	27.1
PENDIDIKAN TERAKHIR			
<= SD	27.9	37.0	37.0
SLTP	20.0	18.0	18.0
SLTA	36.4	31.3	31.2
Kuliah	15.7	13.8	13.7



VALIDASI: SAMPEL VS POPULASI (%)

KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
PROVINSI			
ACEH	1.8	1.8	1.8
SUMATERA UTARA	5.4	5.3	5.3
SUMATERA BARAT	2.1	2.0	2.0
RIAU	2.3	2.3	2.3
JAMBI	1.3	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.0	3.1	3.1
BENGKULU	0.7	0.7	0.7
LAMPUNG	3.3	3.2	3.2
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0.5	0.5	0.5
KEPULAUAN RIAU	0.7	0.7	0.7
DKI JAKARTA	4.0	4.1	4.1
JAWA BARAT	17.6	17.6	17.6
JAWA TENGAH	13.8	13.9	13.9
DI YOGYAKARTA	1.4	1.4	1.4
JAWA TIMUR	16.0	15.5	15.5
BANTEN	4.4	4.4	4.4
BALI	1.7	1.6	1.6
NUSA TENGGARA BARAT	1.4	1.9	1.9
NUSA TENGGARA TIMUR	2.4	2.0	2.0

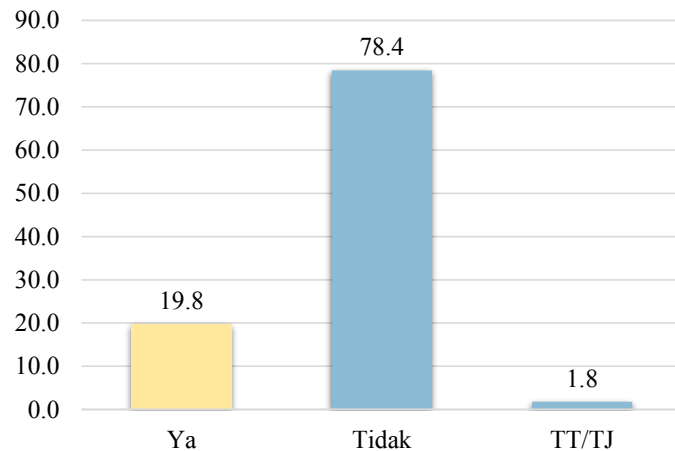
KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
PROVINSI			
KALIMANTAN BARAT	1.6	1.9	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.8	1.0	1.0
KALIMANTAN SELATAN	1.5	1.5	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.5	1.4	1.4
KALIMANTAN UTARA	0.2	0.2	0.2
SULAWESI UTARA	1.0	1.0	1.0
SULAWESI TENGAH	1.1	1.1	1.1
SULAWESI SELATAN	3.2	3.3	3.3
SULAWESI TENGGARA	0.9	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.5	0.5
MALUKU	0.7	0.7	0.7
MALUKU UTARA	0.5	0.5	0.5
PAPUA BARAT	0.2	0.2	0.2
PAPUA BARAT DAYA	0.3	0.2	0.2
PAPUA	0.8	0.4	0.4
PAPUA SELATAN	0.2	0.2	0.2
PAPUA TENGAH	0.6	0.6	0.6
PAPUA PEGUNUNGAN	0.2	0.6	0.6



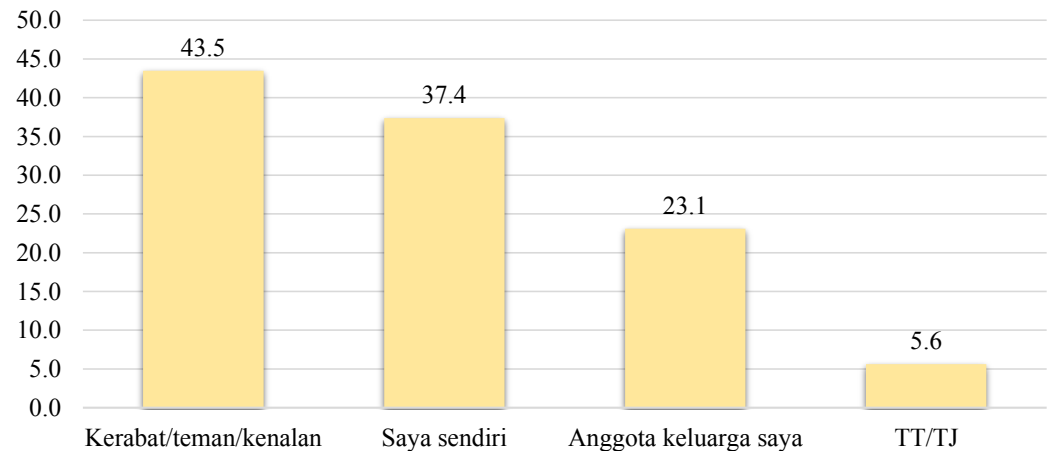
PENEGAKAN HUKUM

BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum (contohnya: polisi, jaksa, hakim pengadilan)?... (%)



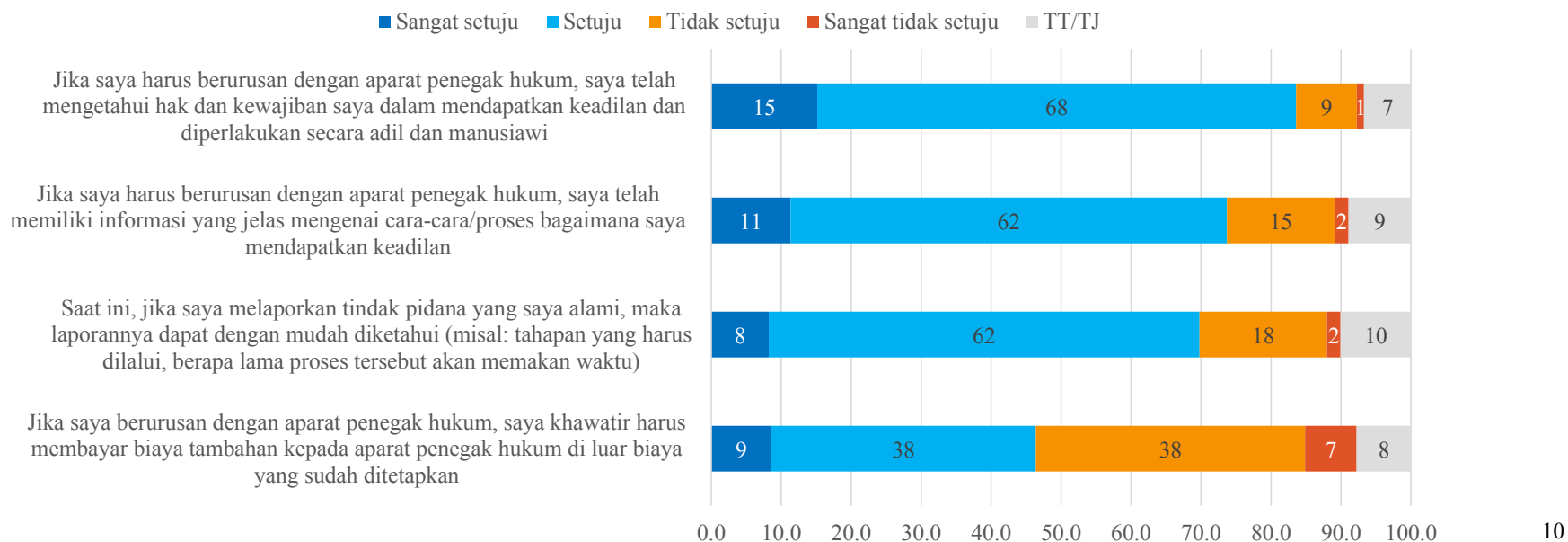
Siapa yang pernah berurusan dengan aparat penegak hukum? (Boleh lebih dari satu jawaban)... (%) [Base: Pernah berurusan dengan aparat]



Sekitar 19.8% mengaku dirinya atau orang disekitarnya pernah berurusan dengan aparat penegakan hukum. Dari yang pernah berurusan, sekitar 43.5% kerabat/teman/kenalan, 37.4% dirinya sendiri, 23.1% anggota keluarganya menyatakan pernah berurusan dengan aparat penegak hukum, sementara 5.6% menjawab tidak tahu/tidak menjawab.

SIKAP TERHADAP BEBERAPA PERNYATAAN JIKA HARUS BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

Saya akan membacakan beberapa pernyataan. Saya minta pendapat Ibu/Bapak apakah Ibu/Bapak sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, atau sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. ... (%)





SIKAP TERHADAP BEBERAPA PERNYATAAN JIKA HARUS BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM MENURUT PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

		1. Jika saya harus berurusan dengan aparat penegak hukum, saya telah memiliki informasi yang jelas mengenai cara-cara/proses bagaimana saya mendapatkan keadilan			2. Jika saya harus berurusan dengan aparat penegak hukum, saya telah mengetahui hak dan kewajiban saya dalam mendapatkan keadilan dan diperlakukan secara adil dan manusiawi		
	BASE	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?							
Ya	19.8	24.8	72.1	3.1	10.4	86.5	3.1
Tidak	78.4	15.8	73.7	10.4	9.7	82.7	7.6
TT/TJ	1.8	4.4	90.2	5.3	0.0	90.2	9.8

Responden yang menyatakan mereka atau orang di sekitar mereka tidak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum menunjukkan tingkat **ketidaksetujuan yang lebih rendah** dibandingkan dengan mereka atau orang di sekitar mereka yang pernah berurusan dengan aparat penegak hukum terhadap pernyataan apakah *mereka telah memiliki informasi yang jelas mengenai cara-cara/proses mendapatkan keadilan*.



SIKAP TERHADAP BEBERAPA PERNYATAAN JIKA HARUS BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM MENURUT PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

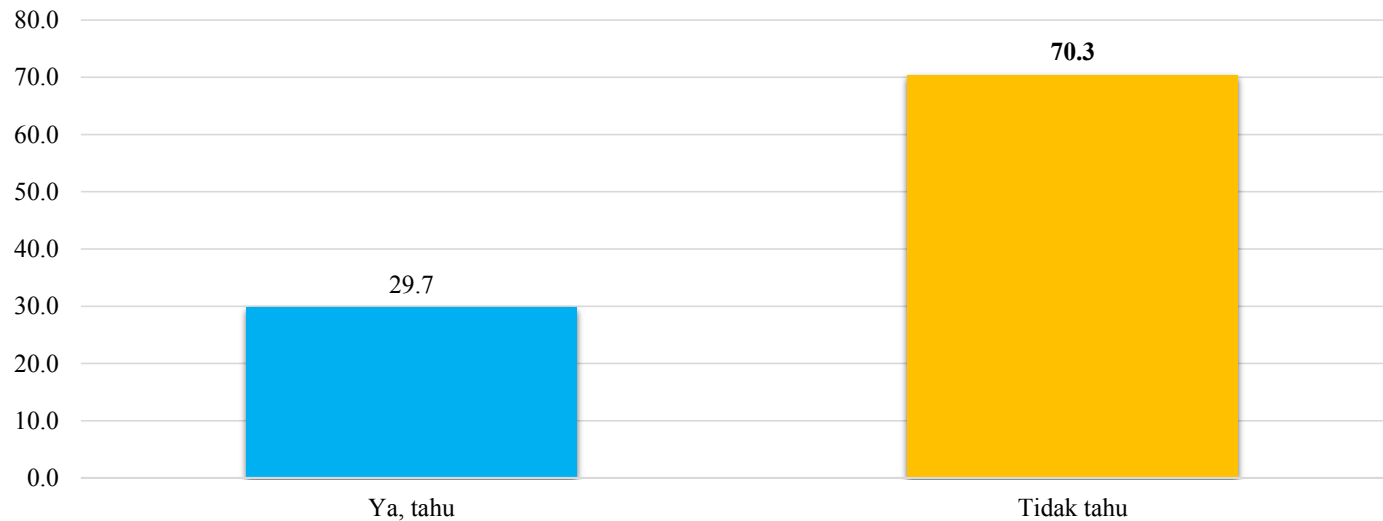
		3. Saat ini, jika saya melaporkan tindak pidana yang saya alami, maka laporannya dapat dengan mudah diketahui (misal: tahapan yang harus dilalui, berapa lama proses tersebut akan memakan waktu)			4. Jika saya berurusan dengan aparat penegak hukum, saya khawatir harus membayar biaya tambahan kepada aparat penegak hukum di luar biaya yang sudah ditetapkan		
	BASE	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?							
Ya	19.8	28.7	68.2	3.1	44.9	52.9	2.2
Tidak	78.4	18.2	70.0	11.7	46.2	44.5	9.2
TT/TJ	1.8	10.3	76.7	13.1	37.7	57.0	5.3

Responden yang menyatakan mereka atau orang di sekitar mereka pernah berurusan dengan aparat penegak hukum menunjukkan tingkat **ketidaksetujuan yang lebih tinggi** terhadap pernyataan apakah *laporan mereka dapat dengan mudah diketahui* dibandingkan dengan mereka atau orang di sekitar mereka yang tidak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum.

Responden yang menyatakan mereka atau orang di sekitar mereka pernah berurusan dengan aparat penegak hukum juga menunjukkan **tingkat setuju yang lebih tinggi** terhadap pernyataan *apakah mereka khawatir harus membayar biaya tambahan kepada aparat penegak hukum di luar biaya yang sudah ditetapkan*, dibandingkan dengan mereka atau orang di sekitar mereka yang tidak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum.

AWARENESS BAHWA SAAT INI PEMERINTAH DAN DPR SEDANG MEMBAHAS PERUBAHAN KUHAP

Apakah Ibu/Bapak tahu/ pernah dengar bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?... (%)



Hanya sekitar 29.7% tahu saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mayoritas (70.3) menyatakan tidak tahu bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan KUHAP.

AWARENESS BAHWA SAAT INI PEMERINTAH DAN DPR SEDANG MEMBAHAS PERUBAHAN KUHAP MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Ya, tahu	Tidak tahu
GENDER			
Laki-laki	49.9	33.0	67.0
Perempuan	50.1	26.4	73.6
USIA			
<= 21 tahun	10.1	35.1	64.9
22 - 25 tahun	9.8	27.6	72.4
26 - 40 tahun	32.3	30.7	69.3
41 - 55 tahun	27.6	29.1	70.9
> 55 tahun	20.3	27.4	72.6
ETNIS			
Jawa	40.3	28.8	71.2
Sunda	15.9	30.1	69.9
Batak	3.6	41.5	58.5
Madura	3.0	36.4	63.6
Betawi	2.9	17.3	82.7
Minang	2.6	15.0	85.0
Bugis	2.6	45.2	54.8
Melayu	2.3	9.9	90.1
Lainnya	26.8	31.5	68.5
AGAMA			
Islam	86.9	28.5	71.5
Nahdlatul Ulama (NU)	58.5	28.0	72.0
Muhammadiyah	5.9	22.6	77.4
Lainnya	0.8	8.0	92.0
Bukan bagian organisasi Islam manapun	29.5	27.8	72.2
TT/TJ	5.4	46.9	53.1
Lainnya	13.1	37.7	62.3

	BASE	Ya, tahu	Tidak tahu
PENDIDIKAN			
<= SD	37.0	24.8	75.2
SLTP	18.0	37.9	62.1
SLTA	31.3	28.6	71.4
Kuliah	13.8	34.6	65.4
PEKERJAAN			
Petani, peternak, nelayan	16.5	23.5	76.5
Buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, supir/ojek, pedagang kecil (warung/kaki lima), kerja tidak tetap, dll.	24.5	29.5	70.5
Toko/grosir, wiraswasta, pengusaha, kontraktor, dll.	12.1	36.7	63.3
Pegawai (Negeri/swasta), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll.	12.4	36.0	64.0
Ibu rumah tangga	26.6	23.2	76.8
Masih sekolah/kuliah	5.2	46.3	53.7
Lainnya	2.8	41.8	58.2
TT/TJ	0.0	0.0	0.0
PENDAPATAN			
Di bawah 1 Juta	26.0	23.8	76.2
1 Juta s/d kurang dari 2 Juta	28.7	25.5	74.5
2 Juta s/d kurang dari 4 Juta	27.1	30.4	69.6
4 Juta atau lebih	13.2	48.7	51.3
TT/TJ	4.9	30.7	69.3

AWARENESS BAHWA SAAT INI PEMERINTAH DAN DPR SEDANG MEMBAHAS PERUBAHAN KUHAP MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Ya, tahu	Tidak tahu
DESA-KOTA			
Pedesaan	50.4	28.5	71.5
Perkotaan	49.6	31.0	69.0
WILAYAH			
SUMATERA	21.2	29.8	70.2
BANTEN	4.4	45.8	54.2
DK JAKARTA	4.1	27.2	72.8
JAWA BARAT	17.6	31.2	68.8
JAWA TENGAH+DI YOGYAKARTA	15.3	25.2	74.8
JAWA TIMUR	15.5	28.9	71.1
BALI NUSA	5.5	29.6	70.4
KALIMANTAN	6.0	29.4	70.6
SULAWESI	7.2	26.0	74.0
MALUKU PAPUA	3.3	36.5	63.5

SIKAP ATAS BEBERAPA PERNYATAAN TERKAIT PROSES PENEGAKAN HUKUM

Saya akan membacakan beberapa pernyataan. Saya minta pendapat Ibu/Bapak apakah Ibu/Bapak sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, atau sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. ... (%)



Survei Nasional, 22-26 Maret 2025



SIKAP TERHADAP BEBERAPA PERNYATAAN TERKAIT PROSES PENEGAKAN HUKUM MENURUT PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

		1. Setiap orang yang diperiksa oleh aparat penegak hukum harus didampingi oleh advokat atau penasihat hukum.			2. Semua bukti atas suatu perkara pidana harus diperoleh melalui tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Jika tidak, bukti tersebut tidak boleh menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana			3. Setiap penggeledahan/razia harus ada surat izin DAN disaksikan oleh minimal 2 orang saksi selain aparat penegak hukum (misal: Ketua RT, ketua lingkungan, dll).		
	BASE	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?										
Ya	19.8	18.1	78.6	3.3	12.0	84.3	3.7	4.3	94.4	1.2
Tidak	78.4	12.7	80.1	7.2	12.1	77.2	10.8	5.7	87.8	6.5
TT/TJ	1.8	17.4	77.2	5.3	19.7	61.4	18.9	12.2	82.5	5.3



SIKAP TERHADAP BEBERAPA PERNYATAAN TERKAIT PROSES PENEGAKAN HUKUM MENURUT PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

		4. Sebelum aparat penegak hukum melakukan upaya paksa (misal: penangkapan, penahanan, penyitaan) harus didahului pengujian oleh pengadilan tentang perlu/tidaknya upaya tersebut dilakukan			5. Perlu ada saluran yang jelas untuk menyampaikan keberatan bagi setiap orang yang dipanggil/diperiksa oleh aparat penegak hukum			6. Untuk kasus kriminal ringan (misal: pencurian karena pelaku terdesak ekonomi) diperlukan mekanisme penyelesaian di luar sidang dengan aturan yang jelas dan memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak		
	BASE	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?										
Ya	19.8	14.1	82.1	3.8	12.1	85.7	2.2	14.4	84.0	1.5
Tidak	78.4	13.3	77.1	9.6	11.2	76.0	12.8	10.3	80.8	8.9
TT/TJ	1.8	11.3	83.4	5.3	4.4	75.9	19.7	12.2	81.0	6.8

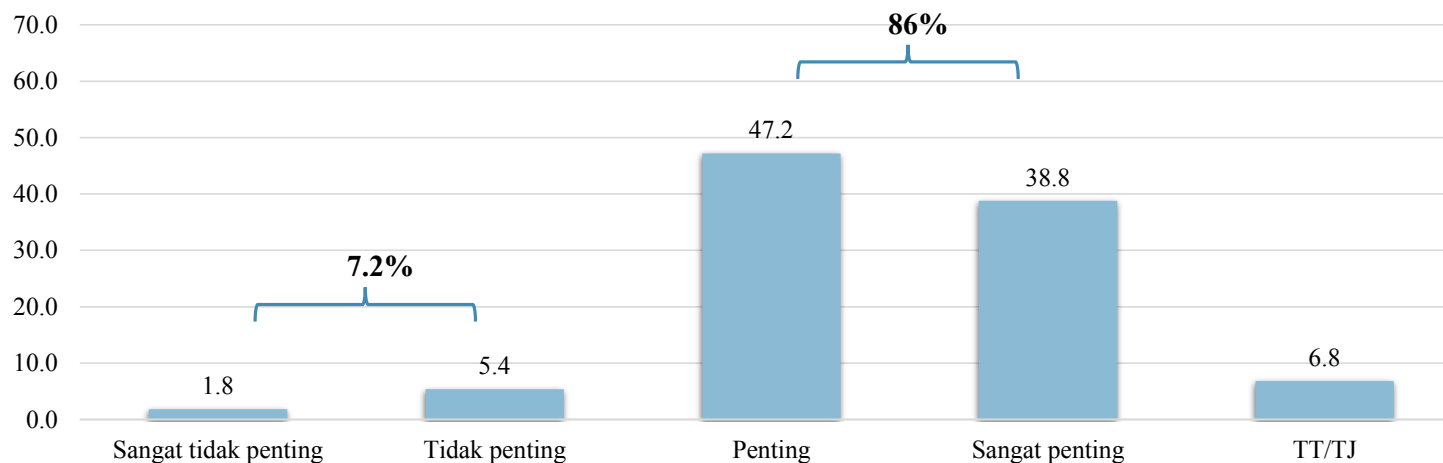


SIKAP TERHADAP BEBERAPA PERNYATAAN TERKAIT PROSES PENEGAKAN HUKUM MENURUT PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

		7. Penyelesaian di luar sidang untuk kasus kriminal ringan harus berkoordinasi dengan kejaksaan dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan			8. Informasi perkembangan setiap perkara kriminal dari awal hingga akhir harus tersedia dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas		
	BASE	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ	Sangat tidak setuju+tidak setuju	Sangat setuju+Setuju	TT/TJ
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?							
Ya	19.8	21.6	74.5	3.9	13.1	82.5	4.4
Tidak	78.4	23.6	64.6	11.8	11.5	78.1	10.5
TT/TJ	1.8	25.6	69.1	5.3	4.4	90.2	5.3

URGENSI ADANYA SALURAN LAIN UNTUK MENINDAK LANJUTI LAPORAN YANG BELUM MENDAPAT KEJELASAN

Bayangkan Ibu/Bapak ada dalam sebuah situasi Ibu/Bapak menjadi korban tindak kejahatan. Kemudian, Ibu/Bapak membuat laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum. Namun, laporan tersebut tidak mendapatkan kejelasan dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima. Menurut Ibu/Bapak seberapa penting adanya saluran lain untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan tersebut? (misal: mengadukan mandeknya laporan tersebut ke Penuntut Umum)... (%)



Mayoritas (86%) menyatakan adanya saluran lain untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan adalah hal yang penting/sangat penting.

URGENSI ADANYA SALURAN LAIN UNTUK MENINDAK LANJUTI LAPORAN YANG BELUM MENDAPAT KEJELASAN MENURUT DEMOGRAFI

	BASE	Sangat tidak penting+Tidak penting	Sangat penting+Penting	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	49.9	7.4	86.1	6.5
Perempuan	50.1	7.1	85.8	7.2
USIA				
<= 21 tahun	10.1	0.0	88.0	12.0
22 - 25 tahun	9.8	4.8	92.8	2.4
26 - 40 tahun	32.3	9.1	86.1	4.8
41 - 55 tahun	27.6	7.2	85.2	7.6
> 55 tahun	20.3	8.9	82.4	8.6
ETNIS				
Jawa	40.3	7.6	81.4	11.0
Sunda	15.9	5.2	90.1	4.7
Batak	3.6	13.1	86.9	0.0
Madura	3.0	10.8	87.1	2.1
Betawi	2.9	4.6	95.4	0.0
Minang	2.6	16.1	81.4	2.6
Bugis	2.6	8.6	81.6	9.8
Melayu	2.3	3.3	90.7	6.0
Lainnya	26.8	6.3	89.6	4.2
AGAMA				
Islam	86.9	7.3	85.5	7.2
Nahdlatul Ulama (NU)	58.5	8.0	85.5	6.5
Muhammadiyah	5.9	4.5	71.9	23.6
Lainnya	0.8	9.8	82.1	8.0
Bukan bagian organisasi Islam manapun	29.5	5.5	89.0	5.5
TT/TJ	5.4	13.1	80.5	6.4
Lainnya	13.1	6.3	89.3	4.4

	BASE	Sangat tidak penting+Tidak penting	Sangat penting+Penting	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	37.0	8.0	83.9	8.1
SLTP	18.0	8.9	85.8	5.3
SLTA	31.3	5.9	86.2	7.8
Kuliah	13.8	5.9	91.1	3.0
PEKERJAAN				
Petani, peternak, nelayan	16.5	8.1	83.0	8.9
Buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, supir/ojek, pedagang kecil (warung/kaki lima), kerja tidak tetap, dll.	24.5	10.0	81.6	8.4
Toko/grosir, wiraswasta, pengusaha, kontraktor, dll.	12.1	6.3	91.0	2.7
Pegawai (Negeri/swasta), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll.	12.4	5.5	89.0	5.5
Ibu rumah tangga	26.6	6.6	85.1	8.4
Masih sekolah/kuliah	5.2	0.0	100.0	0.0
Lainnya	2.8	9.0	88.9	2.2
TT/TJ	0.0	0.0	0.0	0.0
PENDAPATAN				
Di bawah 1 Juta	26.0	9.0	86.4	4.6
1 Juta s/d kurang dari 2 Juta	28.7	8.2	83.7	8.1
2 Juta s/d kurang dari 4 Juta	27.1	5.9	87.3	6.9
4 Juta atau lebih	13.2	5.2	92.0	2.8
TT/TJ	4.9	4.8	73.5	21.7

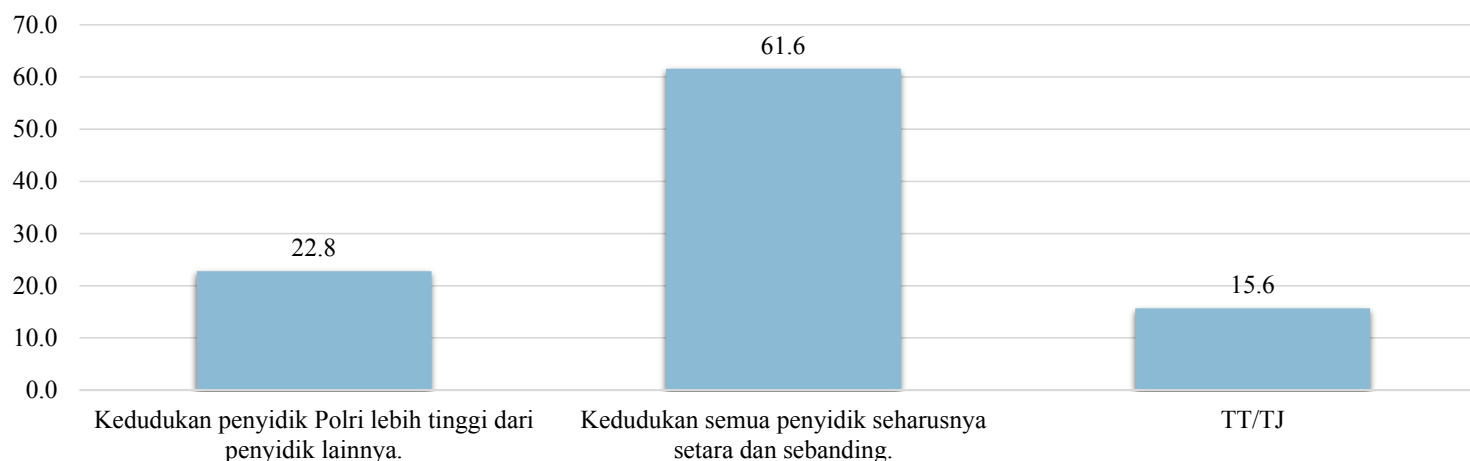


URGENSI ADANYA SALURAN LAIN UNTUK MENINDAK LANJUTI LAPORAN YANG BELUM MENDAPAT KEJELASAN MENURUT WILAYAH DAN PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

	BASE	Sangat tidak penting+Tidak penting	Sangat penting+Penting	TT/TJ
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.4	7.5	83.3	9.2
Perkotaan	49.6	6.9	88.6	4.4
WILAYAH				
SUMATERA	21.2	10.0	85.8	4.2
BANTEN	4.4	14.0	77.6	8.4
DK JAKARTA	4.1	2.9	95.5	1.6
JAWA BARAT	17.6	5.4	91.7	3.0
JAWA TENGAH+DI YOGYAKARTA	15.3	7.6	76.6	15.8
JAWA TIMUR	15.5	6.8	84.2	9.0
BALI NUSA	5.5	6.9	87.8	5.3
KALIMANTAN	6.0	4.8	92.7	2.5
SULAWESI	7.2	3.8	87.7	8.5
MALUKU PAPUA	3.3	7.9	88.9	3.2
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?				
Ya	19.8	8.4	89.5	2.1
Tidak	78.4	7.0	84.9	8.1
TT/TJ	1.8	2.0	92.7	5.3

KEDUDUKAN PENYIDIK POLRI DIBANDING PENYIDIK LAIN

Ada yang berpendapat kedudukan penyidik Polri lebih tinggi dari penyidik lainnya, seperti penyidik Kejaksaan, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ada juga yang berpendapat seharusnya kedudukan semua penyidik (Polri, Kejaksaan, BNN, dan PPNS) setara dan sebanding secara kualifikasi dan kompetensi agar penyidikan lebih efektif. Mana pernyataan yang lebih dekat dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas (61.6%) menyatakan “kedudukan semua penyidik seharusnya setara dan sebanding.” 22.8% menyatakan “kedudukan penyidik Polri lebih tinggi dari penyidik lainnya,” sementara 15.6% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.



SIKAP TERKAIT KEDUDUKAN PENYIDIK POLRI DIBANDING PENYIDIK LAINNYA MENURUT DEMOGRAFI

	BASE	Kedudukan penyidik Polri lebih tinggi dari penyidik lainnya.	Kedudukan semua penyidik seharusnya setara dan sebanding.	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	49.9	19.1	68.6	12.3
Perempuan	50.1	26.4	54.6	18.9
USIA				
<= 21 tahun	10.1	35.6	59.2	5.2
22 - 25 tahun	9.8	18.2	67.6	14.2
26 - 40 tahun	32.3	22.9	64.5	12.5
41 - 55 tahun	27.6	21.2	58.8	20.0
> 55 tahun	20.3	20.5	59.0	20.5
ETNIS				
Jawa	40.3	20.3	61.0	18.7
Sunda	15.9	22.8	55.5	21.8
Batak	3.6	8.5	88.3	3.2
Madura	3.0	38.5	53.2	8.2
Betawi	2.9	18.6	77.0	4.4
Minang	2.6	51.1	45.0	3.9
Bugis	2.6	19.2	66.6	14.2
Melayu	2.3	22.7	68.1	9.3
Lainnya	26.8	24.7	62.4	12.9
AGAMA				
Islam	86.9	24.1	59.8	16.1
Nahdlatul Ulama (NU)	58.5	25.3	60.2	14.5
Muhammadiyah	5.9	14.9	57.1	28.0
Lainnya	0.8	8.0	84.2	7.7
Bukan bagian organisasi Islam manapun	29.5	25.2	57.7	17.0
TT/TJ	5.4	17.7	66.0	16.3
Lainnya	13.1	13.8	73.7	12.5

	BASE	Kedudukan penyidik Polri lebih tinggi dari penyidik lainnya.	Kedudukan semua penyidik seharusnya setara dan sebanding.	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	37.0	23.9	51.7	24.4
SLTP	18.0	17.2	72.7	10.2
SLTA	31.3	28.5	60.5	11.1
Kuliah	13.8	14.1	76.3	9.6
PEKERJAAN				
Petani, peternak, nelayan	16.5	21.5	60.8	17.6
Buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, supir/ojek, pedagang kecil (warung/kaki lima), kerja tidak tetap, dll.	24.5	26.7	53.4	19.9
Toko/grosir, wiraswasta, pengusaha, kontraktor, dll.	12.1	25.4	67.5	7.1
Pegawai (Negeri/swasta), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll.	12.4	19.3	71.9	8.8
Ibu rumah tangga	26.6	22.5	57.2	20.3
Masih sekolah/kuliah	5.2	18.4	78.8	2.8
Lainnya	2.8	10.5	76.1	13.4
TT/TJ	0.0	0.0	0.0	0.0
PENDAPATAN				
Di bawah 1 Juta	26.0	23.2	55.4	21.4
1 Juta s/d kurang dari 2 Juta	28.7	20.9	63.8	15.3
2 Juta s/d kurang dari 4 Juta	27.1	25.4	62.9	11.7
4 Juta atau lebih	13.2	15.3	74.7	10.1
TT/TJ	4.9	37.1	39.0	24.0

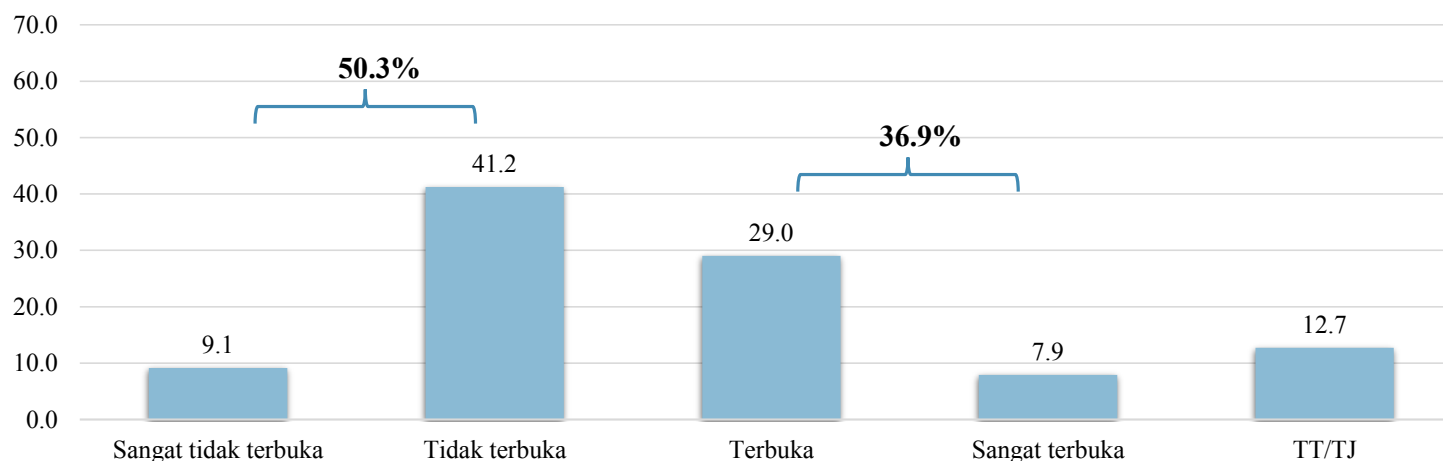


SIKAP TERKAIT KEDUDUKAN PENYIDIK POLRI DIBANDING PENYIDIK LAINNYA MENURUT WILAYAH DAN PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

	BASE	Kedudukan penyidik Polri lebih tinggi dari penyidik lainnya.	Kedudukan semua penyidik seharusnya setara dan sebanding.	TT/TJ
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.4	21.7	59.5	18.8
Perkotaan	49.6	23.9	63.7	12.4
WILAYAH				
SUMATERA	21.2	21.9	68.9	9.2
BANTEN	4.4	27.7	49.0	23.3
DK JAKARTA	4.1	19.0	79.9	1.2
JAWA BARAT	17.6	22.4	56.3	21.3
JAWA TENGAH+DI YOGYAKARTA	15.3	12.1	61.0	26.9
JAWA TIMUR	15.5	35.0	54.6	10.5
BALI NUSA	5.5	17.4	62.2	20.5
KALIMANTAN	6.0	14.3	72.5	13.2
SULAWESI	7.2	30.7	52.9	16.3
MALUKU PAPUA	3.3	28.5	70.3	1.3
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?				
Ya	19.8	23.3	69.1	7.6
Tidak	78.4	22.4	60.1	17.5
TT/TJ	1.8	33.6	44.8	21.6

PROSES PENANGANAN KASUS DIMANA APARAT MELAKUKAN TINDAK KRIMINAL SUDAH TERBUKA BAGI MASYARAKAT?

Menurut Ibu/Bapak apakah proses penanganan kasus-kasus dimana aparat melakukan tindak kriminal sudah terbuka (transparan) bagi masyarakat? (Contoh: kasus Ferdy Sambo, kasus suap hakim yang menangani kasus Ronald Tannur, dll)... (%)



Mayoritas (50.3%) memandang proses penanganan kasus-kasus dimana aparat melakukan tindak kriminal ”tidak terbuka/sangat tidak terbuka”, sementara sekitar 36.9% menilai “terbuka/sangat terbuka”, 12.7% menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.



PROSES PENANGANAN KASUS DIMANA APARAT MELAKUKAN TINDAK KRIMINAL SUDAH TERBUKA BAGI MASYARAKAT? [MENURUT DEMOGRAFI]

	BASE	Sangat tidak terbuka+ Tidak terbuka	Sangat terbuka+terbuka	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	49.9	54.8	35.6	9.6
Perempuan	50.1	45.9	38.2	15.9
USIA				
<= 21 tahun	10.1	44.4	35.1	20.5
22 - 25 tahun	9.8	49.3	42.7	8.0
26 - 40 tahun	32.3	52.4	39.3	8.4
41 - 55 tahun	27.6	49.6	35.1	15.3
> 55 tahun	20.3	51.5	33.8	14.7
ETNIS				
Jawa	40.3	47.1	36.5	16.5
Sunda	15.9	47.7	39.8	12.6
Batak	3.6	60.9	39.1	0.0
Madura	3.0	62.5	20.9	16.6
Betawi	2.9	73.9	26.1	0.0
Minang	2.6	42.9	53.7	3.4
Bugis	2.6	62.1	30.6	7.3
Melayu	2.3	50.2	37.4	12.4
Lainnya	26.8	51.1	37.5	11.4
AGAMA				
Islam	86.9	51.1	35.5	13.5
Nahdlatul Ulama (NU)	58.5	51.0	36.2	12.8
Muhammadiyah	5.9	39.6	36.6	23.7
Lainnya	0.8	69.3	23.0	7.7
Bukan bagian organisasi Islam manapun	29.5	54.0	32.6	13.4
TT/TJ	5.4	45.7	43.9	10.4
Lainnya	13.1	45.7	46.4	8.0

	BASE	Sangat tidak terbuka+Tidak terbuka	Sangat terbuka+terbuka	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	37.0	41.9	40.8	17.3
SLTP	18.0	56.8	33.3	10.0
SLTA	31.3	51.8	35.2	13.0
Kuliah	13.8	61.1	35.3	3.6
PEKERJAAN				
Petani, peternak, nelayan	16.5	43.8	38.9	17.2
Buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, supir/ojek, pedagang kecil (warung/kaki lima), kerja tidak tetap, dll.	24.5	52.9	33.2	13.9
Toko/grosir, wiraswasta, pengusaha, kontraktor, dll.	12.1	48.0	38.4	13.6
Pegawai (Negeri/swasta), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll.	12.4	55.7	36.7	7.6
Ibu rumah tangga	26.6	45.5	40.1	14.4
Masih sekolah/kuliah	5.2	73.4	26.6	0.0
Lainnya	2.8	55.6	40.9	3.4
TT/TJ	0.0	0.0	0.0	0.0
PENDAPATAN				
Di bawah 1 Juta	26.0	44.7	42.5	12.8
1 Juta s/d kurang dari 2 Juta	28.7	44.1	39.7	16.2
2 Juta s/d kurang dari 4 Juta	27.1	62.1	28.8	9.0
4 Juta atau lebih	13.2	58.8	38.0	3.2
TT/TJ	4.9	28.4	32.9	38.7

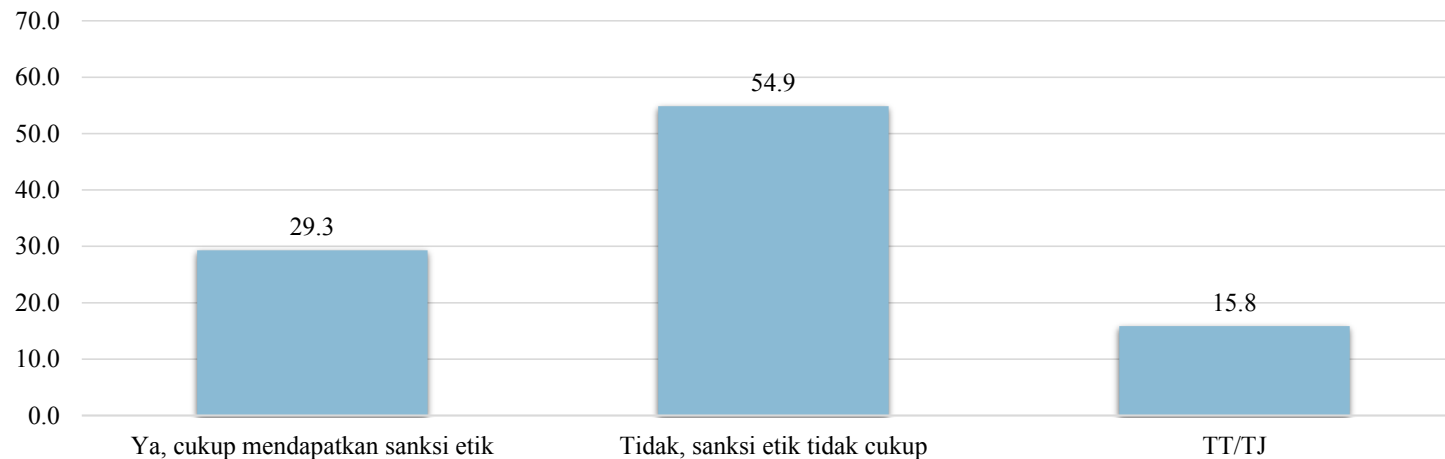


PROSES PENANGANAN KASUS DIMANA APARAT MELAKUKAN TINDAK KRIMINAL SUDAH TERBUKA BAGI MASYARAKAT? MENURUT WILAYAH DAN PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

	BASE	Sangat tidak terbuka+Tidak terbuka	Sangat terbuka+terbuka	TT/TJ
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.4	45.9	38.5	15.6
Perkotaan	49.6	54.9	35.3	9.8
WILAYAH				
SUMATERA	21.2	52.2	39.1	8.7
BANTEN	4.4	56.9	30.3	12.8
DK JAKARTA	4.1	64.9	35.1	0.0
JAWA BARAT	17.6	51.1	38.2	10.7
JAWA TENGAH+DI YOGYAKARTA	15.3	46.6	32.3	21.0
JAWA TIMUR	15.5	40.2	38.0	21.8
BALI NUSA	5.5	55.5	37.3	7.2
KALIMANTAN	6.0	59.6	27.9	12.4
SULAWESI	7.2	45.0	47.8	7.2
MALUKU PAPUA	3.3	59.1	34.8	6.1
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?				
Ya	19.8	63.3	33.0	3.8
Tidak	78.4	47.2	37.5	15.3
TT/TJ	1.8	47.1	52.9	0.0

APARAT YANG MELAKUKAN TINDAK KRIMINAL CUKUP DIBERIKAN SANKSI ETIK?

Menurut Ibu/Bapak apakah penyelesaian kasus-kasus di mana aparat melakukan tindak kriminal cukup mendapatkan sanksi etik?... (%)



Mayoritas (54.9%) menyatakan sanksi etik tidak cukup untuk kasus-kasus di mana aparat melakukan tindak kriminal. 29.3% menyatakan sanksi etik cukup untuk kasus-kasus di mana aparat melakukan tindak kriminal, sedangkan 15.8% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.



APARAT YANG MELAKUKAN TINDAK KRIMINAL CUKUP DIBERIKAN SANKSI ETIK? [MENURUT DEMOGRAFI]

	BASE	Ya, cukup mendapatkan sanksi etik	Tidak, sanksi etik tidak cukup	TT/TJ		BASE	Ya, cukup mendapatkan sanksi etik	Tidak, sanksi etik tidak cukup
GENDER					PENDIDIKAN			
Laki-laki	49.9	25.7	58.5	15.8	<= SD	37.0	30.8	45.1
Perempuan	50.1	32.9	51.3	15.8	SLTP	18.0	28.6	59.0
USIA					SLTA	31.3	29.5	59.8
<= 21 tahun	10.1	39.2	53.9	6.8	Kuliah	13.8	25.7	64.5
22 - 25 tahun	9.8	31.1	54.9	14.0	PEKERJAAN			
26 - 40 tahun	32.3	28.1	59.2	12.7	Petani, peternak, nelayan	16.5	31.6	49.2
41 - 55 tahun	27.6	26.4	54.6	19.1	Buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, supir/ojek, pedagang kecil (warung/kaki lima), kerja tidak tetap, dll.	24.5	29.6	50.0
> 55 tahun	20.3	29.3	48.9	21.8	Toko/grosir, wiraswasta, pengusaha, kontraktor, dll.	12.1	43.2	46.4
ETNIS					Pegawai (Negeri/swasta), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll.	12.4	19.8	66.2
Jawa	40.3	26.4	52.6	21.0	Ibu rumah tangga	26.6	31.1	52.6
Sunda	15.9	27.2	57.1	15.7	Masih sekolah/kuliah	5.2	6.9	93.1
Batak	3.6	21.8	70.0	8.2	Lainnya	2.8	19.8	67.3
Madura	3.0	25.7	56.8	17.5	TT/TJ	0.0	0.0	0.0
Betawi	2.9	24.5	75.5	0.0	PENDAPATAN			
Minang	2.6	12.5	84.1	3.4	Di bawah 1 Juta	26.0	30.6	49.5
Bugis	2.6	25.5	60.3	14.2	1 Juta s/d kurang dari 2 Juta	28.7	29.3	53.8
Melayu	2.3	39.0	42.4	18.7	2 Juta s/d kurang dari 4 Juta	27.1	26.3	62.3
Lainnya	26.8	38.0	50.2	11.8	4 Juta atau lebih	13.2	30.8	60.0
AGAMA					TT/TJ	4.9	35.1	34.7
Islam	86.9	28.8	54.5	16.7				
Nahdlatul Ulama (NU)	58.5	26.3	56.5	17.2				
Muhammadiyah	5.9	37.8	48.5	13.7				
Lainnya	0.8	27.0	50.4	22.7				
Bukan bagian organisasi Islam manapun	29.5	29.5	54.3	16.2				
TT/TJ	5.4	41.6	41.8	16.6				
Lainnya	13.1	32.8	57.3	9.9				

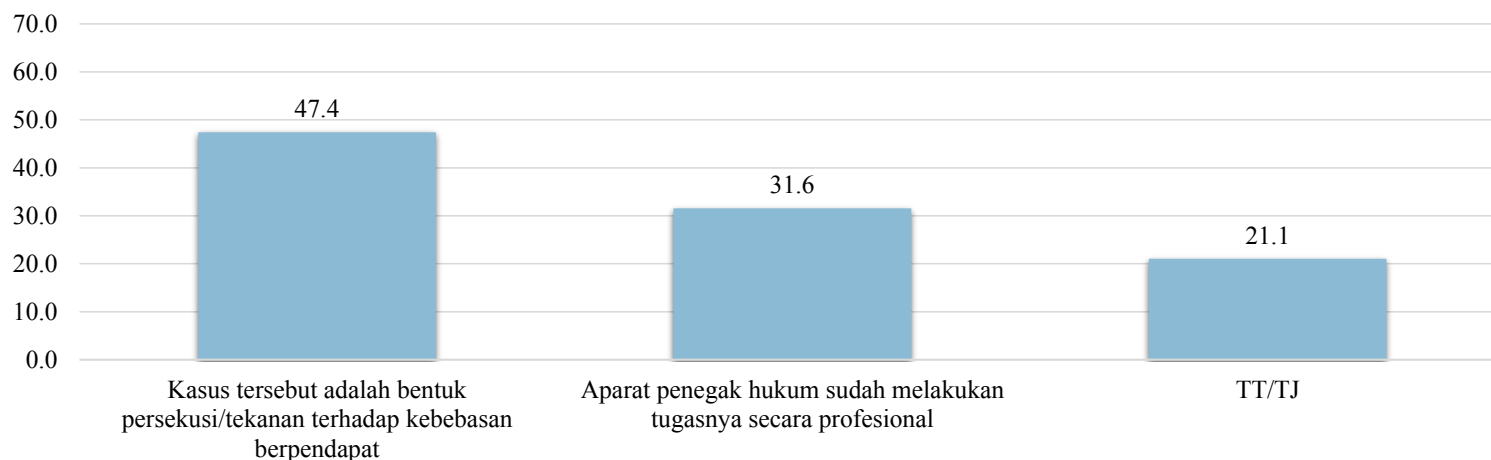


APARAT YANG MELAKUKAN TINDAK KRIMINAL CUKUP DIBERIKAN SANKSI ETIK? MENURUT WILAYAH DAN PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

	BASE	Ya, cukup mendapatkan sanksi etik	Tidak, sanksi etik tidak cukup	TT/TJ
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.4	29.2	51.0	19.8
Perkotaan	49.6	29.4	58.8	11.8
WILAYAH				
SUMATERA	21.2	26.7	64.1	9.2
BANTEN	4.4	14.3	66.3	19.4
DK JAKARTA	4.1	27.3	66.9	5.8
JAWA BARAT	17.6	31.0	54.9	14.1
JAWA TENGAH+DI YOGYAKARTA	15.3	20.7	48.4	30.9
JAWA TIMUR	15.5	39.5	45.6	14.9
BALI NUSA	5.5	35.9	56.8	7.3
KALIMANTAN	6.0	23.8	54.5	21.7
SULAWESI	7.2	41.1	41.6	17.3
MALUKU PAPUA	3.3	25.0	65.2	9.8
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?				
Ya	19.8	25.7	69.6	4.7
Tidak	78.4	30.5	50.9	18.6
TT/TJ	1.8	18.0	65.9	16.1

PERISTIWA ANGGOTA MASYARAKAT YANG DIMINTA MEMINTA MAAF KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM

Belakangan ada beberapa peristiwa anggota masyarakat diminta meminta maaf kepada aparat penegak hukum karena dinilai merendahkan/menghina institusi tertentu (contoh: kasus band Sukatani, kasus video viral patroli pengawalan). Ada yang berpendapat permohonan maaf tersebut adalah bentuk persekusi/tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Ada juga yang berpendapat aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya secara profesional. Mana pernyataan yang lebih dekat dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Lebih banyak warga (47.4%) merasa peristiwa permintaan maaf anggota masyarakat kepada aparat penegak hukum adalah bentuk persekusi/tekanan terhadap kebebasan berpendapat dibandingkan mereka yang menyatakan aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya secara profesional (31.6%).



PERISTIWA ANGGOTA MASYARAKAT YANG DIMINTA MEMINTA MAAF KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM [MENURUT DEMOGRAFI]

	BASE	Kasus tersebut adalah bentuk persekusi/tekanan terhadap kebebasan berpendapat	Aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya secara profesional	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	49.9	54.8	28.4	16.7
Perempuan	50.1	40.0	34.7	25.4
USIA				
<= 21 tahun	10.1	64.4	14.5	21.1
22 - 25 tahun	9.8	53.8	36.4	9.8
26 - 40 tahun	32.3	47.4	36.9	15.7
41 - 55 tahun	27.6	43.1	31.9	25.0
> 55 tahun	20.3	41.6	28.7	29.8
ETNIS				
Jawa	40.3	50.2	27.7	22.2
Sunda	15.9	35.9	34.0	30.1
Batak	3.6	40.6	46.2	13.3
Madura	3.0	34.7	52.0	13.3
Betawi	2.9	73.2	13.0	13.8
Minang	2.6	33.8	23.3	42.9
Bugis	2.6	60.4	27.7	11.9
Melayu	2.3	31.2	47.5	21.3
Lainnya	26.8	51.0	33.5	15.5
AGAMA				
Islam	86.9	48.3	29.7	22.0
Nahdlatul Ulama (NU)	58.5	47.9	27.6	24.5
Muhammadiyah	5.9	46.5	34.9	18.6
Lainnya	0.8	69.3	8.0	22.7
Bukan bagian organisasi Islam manapun	29.5	48.8	33.0	18.2
TT/TJ	5.4	48.4	32.4	19.2
Lainnya	13.1	41.5	43.9	14.6

	BASE	Kasus tersebut adalah bentuk persekusi/tekanan terhadap kebebasan berpendapat	Aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya secara profesional	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	37.0	33.9	36.1	30.0
SLTP	18.0	53.9	30.6	15.5
SLTA	31.3	53.4	26.8	19.8
Kuliah	13.8	61.4	31.3	7.3
PEKERJAAN				
Petani, peternak, nelayan	16.5	37.1	41.9	20.9
Buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, supir/ojek, pedagang kecil (warung/kaki lima), kerja tidak tetap, dll.	24.5	39.0	31.0	29.9
Toko/grosir, wiraswasta, pengusaha, kontraktor, dll.	12.1	65.6	25.7	8.7
Pegawai (Negeri/swasta), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll.	12.4	62.0	25.7	12.3
Ibu rumah tangga	26.6	41.6	34.3	24.1
Masih sekolah/kuliah	5.2	65.8	17.6	16.6
Lainnya	2.8	58.4	26.6	15.0
TT/TJ	0.0	0.0	0.0	0.0
PENDAPATAN				
Di bawah 1 Juta	26.0	37.2	38.1	24.8
1 Juta s/d kurang dari 2 Juta	28.7	33.3	41.8	24.9
2 Juta s/d kurang dari 4 Juta	27.1	61.7	20.5	17.9
4 Juta atau lebih	13.2	65.1	23.7	11.2
TT/TJ	4.9	57.5	19.4	23.2



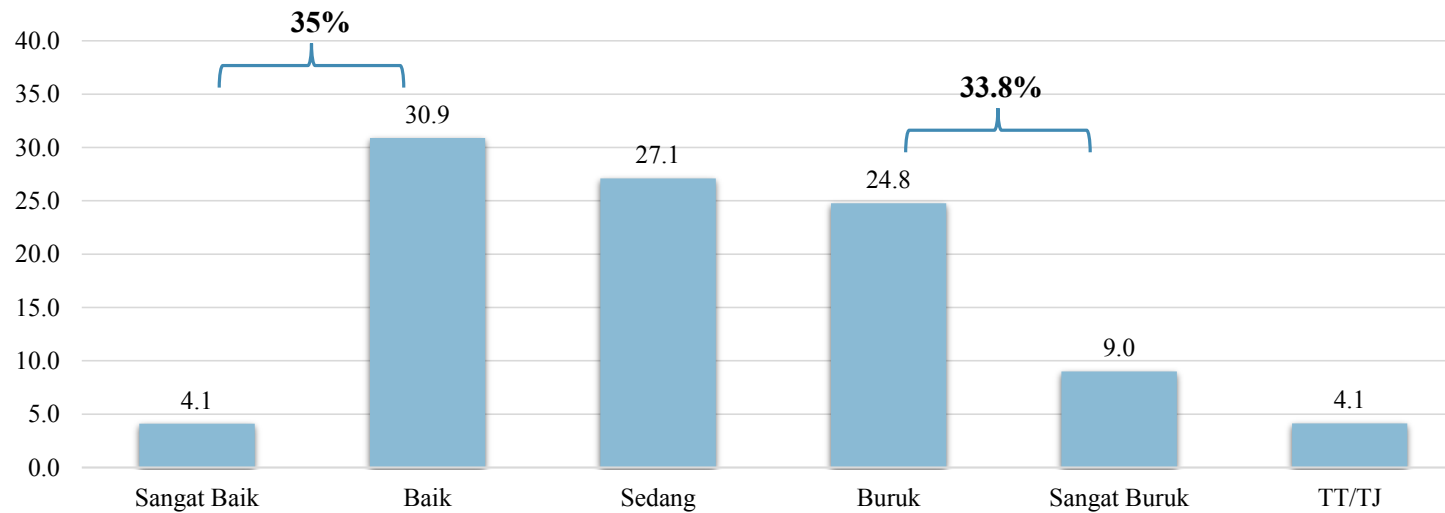
PERISTIWA ANGGOTA MASYARAKAT YANG DIMINTA MEMINTA MAAF KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM MENURUT WILAYAH DAN PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAKAN HUKUM

	BASE	Kasus tersebut adalah bentuk persekusi/tekanan terhadap kebebasan berpendapat	Aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya secara profesional	TT/TJ
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.4	41.2	34.9	23.9
Perkotaan	49.6	53.7	28.2	18.2
WILAYAH				
SUMATERA	21.2	43.4	40.7	15.8
BANTEN	4.4	39.4	26.3	34.3
DK JAKARTA	4.1	69.9	23.8	6.3
JAWA BARAT	17.6	39.2	34.6	26.1
JAWA TENGAH+DI YOGYAKARTA	15.3	37.0	26.1	36.9
JAWA TIMUR	15.5	69.8	21.4	8.8
BALI NUSA	5.5	57.9	28.8	13.3
KALIMANTAN	6.0	47.7	33.3	19.0
SULAWESI	7.2	32.2	38.2	29.6
MALUKU PAPUA	3.3	57.3	32.8	9.9
Apakah Ibu/Bapak atau orang di sekitar Ibu/Bapak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum?				
Ya	19.8	59.7	30.9	9.4
Tidak	78.4	45.0	31.7	23.2
TT/TJ	1.8	14.6	30.9	54.5

KONDISI PENEGAKAN HUKUM

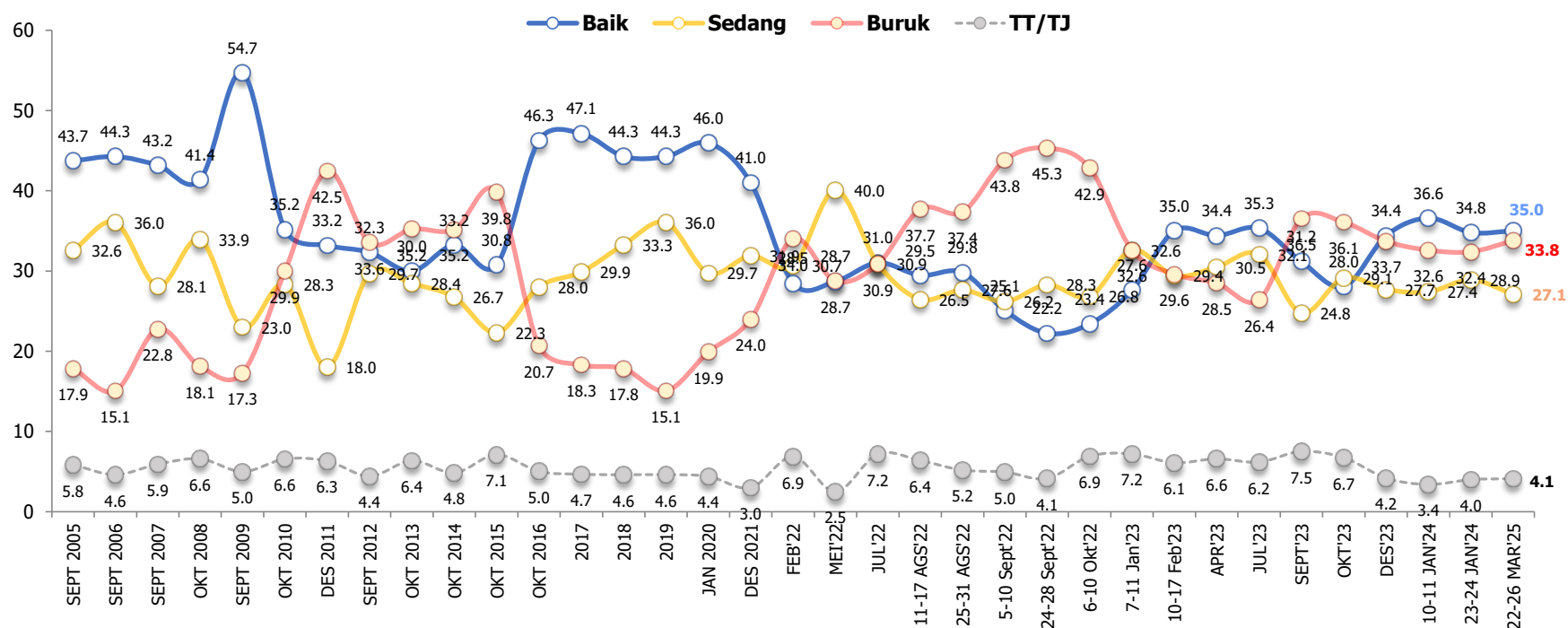
KONDISI PENEGAKAN HUKUM

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)



35% warga menilai kondisi penegakan hukum “baik/sangat baik”, lebih banyak dibanding yang menilai “buruk/sangat buruk” (33.8%). 27.1% lainnya menilai “sedang”, dan 4.1% menjawab tidak tahu/tidak menjawab.

TREN KONDISI PENEGAKAN HUKUM NASIONAL (%)



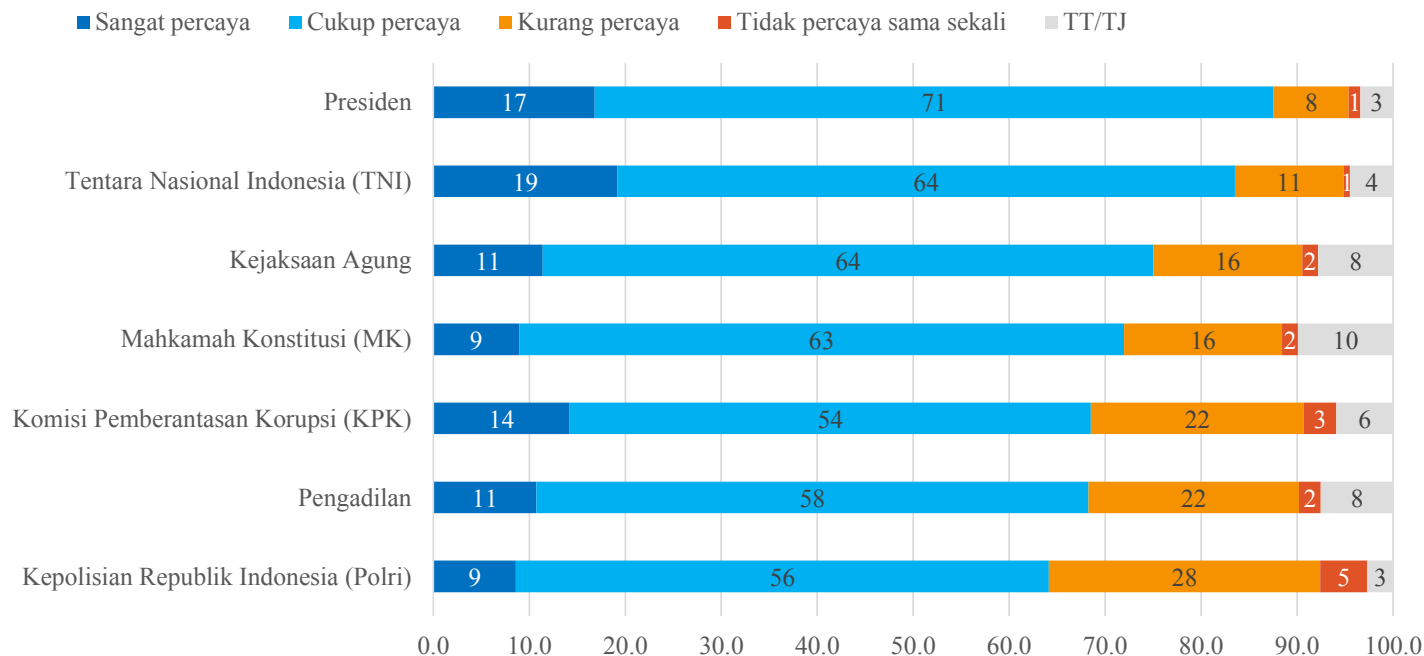
Sumber: Indikator, LSI



TINGKAT KEPERCAYAAN PADA LEMBAGA

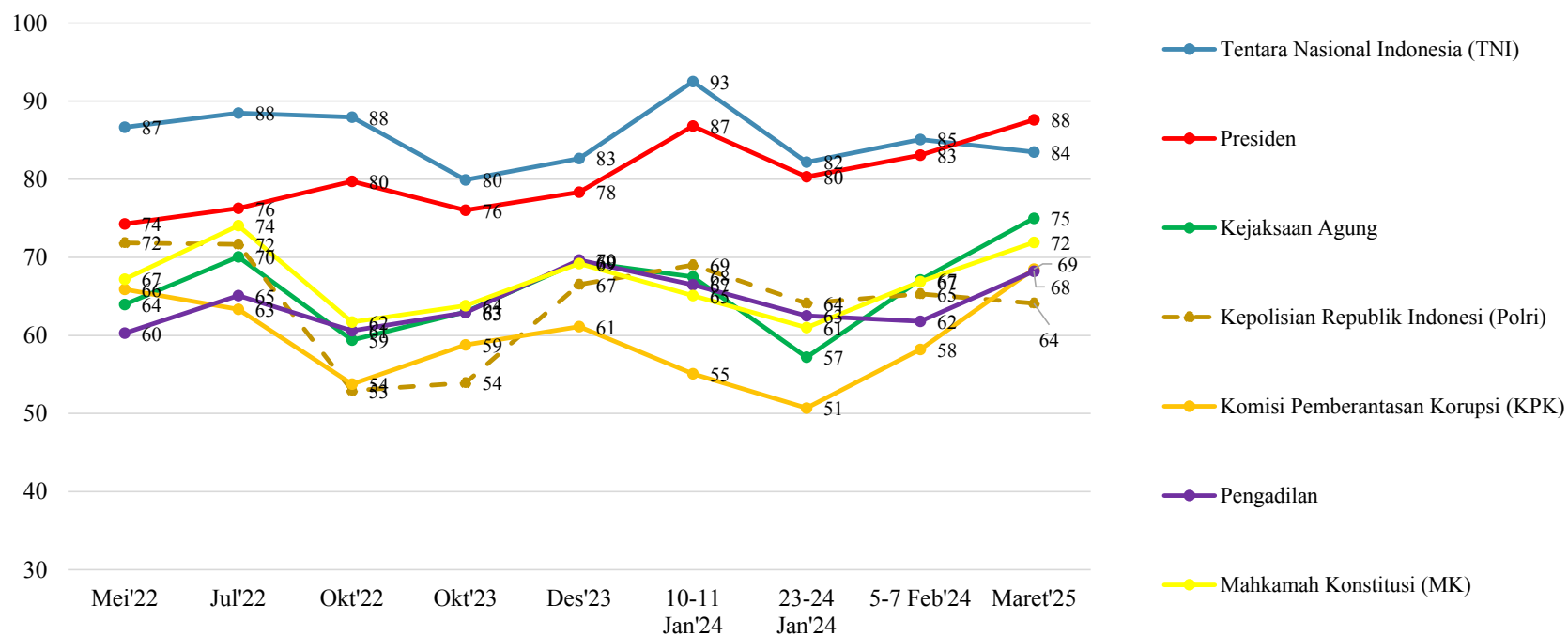
KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA

Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga berikut? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali? ... (%)



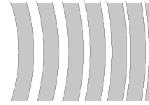
TREN KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA (%)

Cukup/sangat Percaya





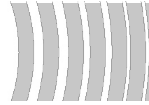
KESIMPULAN



KESIMPULAN

PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN APH, AWARENESS REVISI KUHAP, AWARENESS HAK DAN KEWAJIBAN

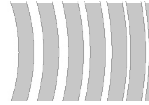
- Sekitar 19.8% mengaku dirinya atau orang disekitarnya pernah berurusan dengan aparat penegakan hukum. Dari yang pernah berurusan, sekitar 43.5% kerabat/teman/kenalan, 37.4% dirinya sendiri, 23.1% anggota keluarganya yang pernah berurusan dengan aparat penegak hukum, sementara 5.6% tidak menjawab.
- Awareness mengenai pembahasan perubahan KUHAP masih sangat rendah. Hanya 29.7% yang mengetahui dibandingkan 70.3% yang tidak tahu bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan KUHAP.
- Mayoritas menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa mereka sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan keadilan dan diperlakukan secara adil dan manusiawi.
- Mayoritas juga menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa mereka telah memiliki informasi yang jelas mengenai cara-cara/proses bagaimana mendapatkan keadilan.
- Namun, kedua pernyataan ini tidak otomatis dapat diartikan bahwa masyarakat pada umumnya telah memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan keadilan dan diperlakukan secara adil, serta mengenai cara-cara/proses bagaimana mendapatkan keadilan.
- Publik cukup terbelah mengenai pernyataan terkait kekhawatiran harus membayar biaya tambahan kepada APH di luar biaya yang ditetapkan. Indikasi awal adanya kekhawatiran publik atas pungli.



KESIMPULAN

ISU-ISU TERKAIT BEBERAPA POIN REVISI KUHP

- Mayoritas responden menunjukkan tingkat persetujuan yang cukup tinggi atas isu-isu terkait proses penegakkan hukum termasuk terkait restorative justice, pendampingan oleh advokat/penasehat hukum, izin dan saksi dalam penggeledahan, ketersediaan dan aksesibilitas informasi perkara criminal, pengujian sebelum upaya paksa, saluran untuk menyampaikan keberatan, dll.
- Mayoritas 86% menyatakan penting/sangat penting adanya saluran lain untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang tidak mendapatkan kejelasan dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima.
- Mayoritas (61.6%) menyatakan kedudukan semua penyidik (misal: penyidik kejaksaan, BNN, dan PPNS) seharusnya setara dan sebanding secara kualifikasi dan kompetensi.
- Mayoritas (50.3%) memandang proses penanganan kasus-kasus dimana aparat melakukan tindak kriminal “tidak terbuka/sangat tidak terbuka.” Hanya 36.9% yang menyatakan bahwa penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat sebagai pelaku tindak kriminal sudah “terbuka/sangat terbuka.”



KESIMPULAN

ISU-ISU TERKAIT BEBERAPA POIN REVISI KUHAP

- Mayoritas responden (54.9%) juga menyatakan sanksi etik saja tidak cukup bagi aparat yang melakukan tindak kriminal.
- Kebanyakan warga, 47.4%, merasa peristiwa permintaan maaf anggota masyarakat kepada aparat penegak hukum karena dinilai merendahkan/menghina institusi tertentu (contoh: kasus band Sukatani, kasus video viral patroli pengawalan) adalah bentuk persekusi/tekanan terhadap kebebasan berpendapat, sementara sekitar 31.6% menilai bahwa aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya secara profesional.
- Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa akan ada revisi KUHAP
- Opini/pendapat masyarakat umum dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak yang terkait revisi KUHAP.

TERIMA KASIH

